

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
OUTSOURCING (ALIH DAYA) DALAM PERJANJIAN KERJA
ANTARA PT. WIRATAMA JAYA PERKASA PADANG
DENGAN TENAGA KERJA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan



Oleh :

MUHAMMAD BAYU ABDULLAH

14 20 123 029

Pembimbing I : Prof. Dr. ZAINUL DAULAY, S.H, M.H

Pembimbing II : NENENG OKTARINA, S.H, M.H

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

ABSTRAK

Mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah *anti-tesis* bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara *dassollen* (keharusan) dan *das sein* (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Nyatanya kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme finansial telah beroperasi melalui “*dis-solution subject*” yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa dieksploitasi, inilah yang terjadi dalam praktik *outsourcing* di Indonesia, sehingga legalisasi *outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menuai kontroversi. Bagi yang setuju beralih *outsourcing* bermanfaat dalam pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Bagi yang menolak beranggapan praktik *outsourcing* merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh. Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah; Bagaimanakah Perlindungan Kerja dan Syarat-Syarat Kerja Bagi Pekerja *Outsourcing*?, bagaimanakah Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh *Outsourcing*?, bagaimanakah Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian *outsourcing* atau alih daya oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang? Tujuannya adalah untuk mengetahui perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja *Outsourcing*?, untuk mengetahui peran pemerintah kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh *Outsourcing*?, Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian *outsourcing* atau alih daya oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang?

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*) serta penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling* dengan metode *Purposive Sampling*.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat *outsourcing* di Kota Padang, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kota Padang perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang telah sesuai dengan peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan

Kata Kunci: Pekerja/Buruh *Outsourcing*, Eksploitasi, dan Perlindungan Hukum.